

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999).

Seperti diketahui bersama, krisis yang melanda Indonesia sejak periode 1997, membawa dampak negatif ke dunia perekonomian nasional umumnya, dan perekonomian regional khususnya. Krisis ini menyebabkan terjadinya perubahan dari nilai tambah sektor-sektor yang ada di wilayah nasional juga di wilayah daerah. Sehingga pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya dua produk undang-undang.

No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang menimbang :

- a. Bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah. Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah.
- b. Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Lahirnya undang-undang tersebut disambut positif oleh banyak kalangan dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktik-praktik sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan pendudukan lokal. Era otonomi telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengembangkan sendiri potensi daerah yang dimilikinya. Dengan kata lain, daerah diberi wewenang mengelola sendiri keuangannya sekaligus menentukan arah pembangunan yang akan dilaksanakan demi tercapainya kemakmuran penduduk di wilayahnya, dengan mempertimbangkan segenap potensi, sumber daya serta faktor-faktor lainnya, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Dengan demikian suatu daerah sangat memerlukan beragam data yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan, baik dalam penyusunan evaluasi pembangunan ekonomi daerah.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka pembangunan daerah Kota Kupang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara terus-menerus untuk menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah menuntut pihak pemerintah daerah untuk lebih mengutamakan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi daerah.

Pada era otonomi daerah paradigma baru dalam pembangunan daerah, keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur dari kemajuan fisik yang diperoleh atau berapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima. Keberhasilan pembangunan harus dapat diukur dengan parameter yang lebih luas dan lebih strategis yang meliputi semua aspek kehidupan baik materil dan non materil. Untuk mengetahui potensi pertumbuhan ekonomi Wilayah Kota Kupang diperlukan suatu metode yang berguna untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman untuk menunjukkan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada.

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi permintaan yang bersifat exogenous (tidak tergantung pada kekuatan intern/permintaan lokal). Sedangkan kegiatan non basis

adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, karena itu permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan masyarakat setempat. Dengan demikian sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Atas dasar anggapan di atas, satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah adalah sektor basis. Oleh karena itu analisis basis sangat berguna untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2004)

Penggunaan pendekatan model basis ekonomi pada umumnya didasarkan atas nilai tambah maupun lapangan kerja. Namun menggunakan data pendapatan (nilai tambah) adalah lebih tepat dibandingkan menggunakan data lapangan kerja. Hal ini dikarenakan lapangan kerja memiliki bobot yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dilihat dari sisi pengeluaran PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah dan Dilihat dari sisi produksi PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan melalui pendekatan nilai tambah (value added). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan

jasa yang dihasilkan di wilayah domestik (BPS, 2008). PDRB merupakan indikator penting di suatu wilayah yang dapat mengindikasikan totalitas produksi neto barang/jasa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah. Laju pertumbuhan PDRB Kota Kupang disumbang oleh 9 (sembilan) sektor yaitu: pertanian; industri ; listrik dan air minum; bangunan ; perdagangan (hotel dan restoran) ; angkutan dan komunikasi; bank dan lembaga keuangan lainnya; jasa-jasa.

Di bawah ini tabel peranan setiap sektor ekonomi dalam perekonomian Kota Kupang Tahun 2015 – 2019

Tabel 1.1
Peranan Setiap Sektor Ekonomi Dalam Perekonomian Kota Kupang
Tahun 2015 - 2019 (Persentase)

Lapangan usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian	2,36	2,29	2,26	2,29	2,24
Pertambangan	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09
Industri	1,52	1,47	1,52	1,54	1,60
Listrik	0,11	0,13	0,13	0,14	0,13
Air Bersih	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11
Konstruksi	16,35	16,88	16,73	16,67	16,29
Perdagangan	14,74	14,65	14,45	14,51	14,85
Transportasi	8,38	8,80	9,09	9,46	9,42
Penyediaan Akomodasi	1,85	1,96	2,13	2,26	2,24
Imformasi	12,67	12,04	11,69	11,44	11,43
Jasa keuangan	7,18	7,45	7,56	7,57	7,38
Perumahan	4,62	3,56	3,43	3,31	3,03
Administrasi Pemerintah	8,01	8,08	7,98	8,17	8,44
Jasa perusahaan	0,78	0,78	0,80	0,76	0,74
Jasa Pendidikan	14,39	14,05	14,33	13,96	14,22
Jasa Kesehatan	4,08	44,00	4,01	4,08	4,12
Jasa Lainnya	3,72	3,62	3,66	3,63	3,68
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Kupang tahun 2020

Peranan setiap sektor ekonomi dalam perekonomian dapat diketahui dari angka distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) seperti yang dapat dilihat melalui Tabel 1.1 Berdasarkan Tabel 1.1 tampak bahwa sektor Pertambangan merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peranan paling rendah dalam perekonomian Kota Kupang pada tahun 2019 sebesar 0,9 persen. Sementara itu sektor jasa Kesehatan merupakan sektor ekonomi yang paling besar Kontribusinya terhadap PDRB Kota Kupang pada tahun 2016, yaitu 44,00 persen.. Rendahnya peranan sektor Air Bersih serta besarnya peranan sektor jasa kesehatan dalam perekonomian Kota Kupang tidak hanya terjadi pada 2015, tetapi sudah terjadi pada beberapa tahun sebelumnya. Pada Tabel diatas dari sektor Kontruksi sekitar 16,35 persen dan sektor Jasa-jasa lainnya berkisar 3,68 persen pada tahun 2019. Maka dari penjelasan di atas untuk melakukan penelitian ini dengan judul **"Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kupang"**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melakukan penelitian terhadap struktur ekonomi potensi wilayah di KotaKupang, maka akan diketahui pergeseran-pergeseran pada pada sektor-sektor Ekonomi di Kota Kupang tersebut, serta mengetahui sektor-sektor potensial memprioritaskan perencanaan pembangunan terhadap seluruh sektor-sektor yang menjadi sektor potensial maupun yang tidak potensial dalam struktur perekonomian di Kota Kupang.

Untuk sektor yang potensial diharapkan mampu mengangkat sektor-sektor yang lain untuk lebih maju lagi, sehingga pergeseran sektoral dalam perekonomian Kota Kupang dapat berjalan bersama meskipun dengan tingkat

perkembangan yang bereda-beda.

Berdasarkan permasalahan di atas muncul beberapa pertanyaan :

1. Bagaimana perkembangan PDRB selama 5 Tahun (tahun 2015-2019) pada masing-masing sektor Kota Kupang ?
2. Apa saja Sektor basis ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Kupang?
3. Apa saja Sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan sebagai penunjang Pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dari Penelitian ini adalah :

1. Menganalisis perkembangan PDRB selama 5 tahun (tahun 2015-2019) Pada masing-masing sektor di Kota Kupang;
2. Menganalisis sektor basis ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Kupang;
3. Menganalisis sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk di kembangkan sebagai Penunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk :

1. Untuk pemerintah
 - a. Mengevaluasi arah kebijakan ekonomi pemerintah daerah, terutama dalam rangka perencanaan ekonomi makro regional dalam menghadapi era otonomi daerah di Daerah Kota Kupang.
 - b. Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi para pemerintah daerah untuk

penetapan kebijakan yang akan datang yang akan berkaitan dengan pembangunan regional.

2. Untuk akademisi sebagai bahan penelitian berikutnya yang terkait.
3. Untuk penulis sebagai pengembangan dan pelatihan diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.